



ETIKA PROFESI :

Kerangka Etik Di Bidang Akuntansi

Dr. Rita Martini, S.E., M.Si., Ak.
Zulkifli, S.E., M.M.

ETIKA PROFESI : KERANGKA ETIK DI BIDANG AKUNTANSI

Dr. Rita Martini, S.E., M.Si., Ak.

Zulkifli, S.E., M.M.



Palembang © 2022, Etika Profesi : Kerangka Etik di Bidang Akuntansi

Dr. Rita Martini, S.E., M.Si., Ak.

Zulkifli, S.E., M.M.

Editor : Dr. Febrianty, SE, M.Si

Perancang Sampul : Jenri Ambarita, M.Pd.K.

Layouter : Rizki Amalia, Amd, Ak

Cetakan Pertama : November 2022

Hak Cipta 2022, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

**Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT**

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org

E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2022 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I - : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2022
; 15,5 x 23

ISBN : 978-623-448-320-8

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

**Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72**

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT berkat dan rahmat hidayahnya penulis dapat menyelesaikan Buku Ajar Etika Profesi yang merupakan salah satu upaya peningkatan hasil pembelajaran. Tulisan ini diharapkan bermanfaat untuk mengetahui dan memahami teori dan aplikasi tentang etika profesi di bidang Akuntansi. Dalam penulisan buku ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa baik pokok-pokok isi pembahasan maupun cara penyajiannya masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan. Untuk itu sangat diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan bahan ajar ini.

Semoga buku ini berguna menjadi referensi bagi mahasiswa dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemahaman akan materi ajar Etika Profesi.

Palembang, November 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I KONSEPSI DASAR ETIKA	1
1.1 Pengertian Etika	1
1.1.1 Prinsip-Prinsip Etika	2
1.1.2 Fungsi Etika	3
1.1.3 Jenis-jenis Etika	3
1.1.4 Etika dan Etiket	4
1.2 Basis Teori Etika	5
1.3 Etika dalam Perkembangan IPTEK	9
1.4 Dilema Etika	11
1.5 Pengertian Profesi	12
1.6 Contoh dan Analisis Kasus	14
BAB II <i>ETHICAL GOVERNANCE</i>	21
2.1 Konsepsi Ethical Governance	21
2.2 Good Corporate Governance (GCG)	22
2.2.1 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance	29
2.2.2 Asas Good Corporate Governance (GCG)	35
2.2.3 Manfaat Good Corporate Governance (GCG)	37
2.2.4 Tujuan good corporate governance	38
2.2.5 Peranan Etika Bisnis dalam Penerapan GCG	40
2.2.6 Sanksi	44
2.3 <i>Governance System</i>	45
2.4 Budaya Etika	47
2.5 Mengembangkan Struktur Etika Korporasi	48
2.6 Kode Perilaku Korporasi (<i>Corporate Code of Conduct</i>)	50
2.7 Evaluasi terhadap Kode Perilaku Korporasi	51
2.8 Contoh dan Analisis Kasus	51

BAB III PENDEKATAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN	57
3.1 Pengertian Pengambilan Keputusan	57
3.2 Ethical Decision Making (EDM) Framework	60
3.3 Pendekatan - Pendekatan Pengambilan Keputusan Etis	61
3.3.1 Memperluas dan Pencampuran Pendekatan	64
3.3.2 Mengintegrasikan Pendekatan Dampak Analisis Filosofis dan Stakeholder	65
3.3.3 Menilai Motivasi, dan Kebajikan yang Diharapkan dan Karakter	65
3.4 Pengembangan Tindakan Lebih Etis	67
3.4.1 Kebiasaan yang Keliru pada Para Pembuat Keputusan	68
3.4.2 Langkah-langkah untuk Mengambil Keputusan yang Beretika	72
3.4.3 Tujuh langkah analisis pengambilan keputusan	72
3.5 Contoh dan Analisis Kasus	73

BAB IV PERILAKU ETIKA DALAM PROFESI AKUNTANSI	77
4.1 Pengertian Akuntansi	77
4.2 Pengertian Etika Profesi Akuntansi	78
4.3 Definisi Akuntan Publik	82
4.4 Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia	83
4.5 Standar Profesional Akuntan Publik	85
4.6 Etika dalam Kantor Akuntan Publik	87
4.7 Prinsip Etika Profesi Menurut IAI dan Prinsip Etika Profesi Akuntan	88
4.7.1 Prinsip Etika Profesi Menurut IAI	88
4.7.2 Prinsip Etika Profesi Akuntan	90
4.8 Perilaku Etika Dalam Profesi Akuntansi	91
4.8.1 Akuntansi sebagai Profesi dan Peran Akuntan	93
4.8.2 Ekspektasi Publik	97

4.8.3	Nilai-nilai Etika vs Teknik Akuntansi/ Auditing	97
4.8.4	Perilaku Etika dalam Pemberian Jasa Akuntan publik	99
4.9	Contoh dan Analisis Kasus	101
BAB V KODE ETIK PROFESI AKUNTANSI		107
5.1	Pengertian Etika Profesi Akuntansi	107
5.2	Prinsip – Prinsip Etika IFAC, AICPA, dan IAI	109
5.3	Prinsip – prinsip etika menurut AICPA	110
5.4	Prinsip-prinsip etika menurut IAI	111
5.5	Aturan dan Interpretasi Etika menurut IAI	114
BAB VI PERILAKU ETIKA DALAM BISNIS		119
6.1	Pengertian Etika	119
6.2	Pengertian Etika Bisnis	119
6.3	Lingkungan Bisnis yang Mempengaruhi Perilaku Etika	121
6.4	Faktor-Faktor yang mempengaruhi etika bisnis	122
6.5	Saling Ketergantungan Antara Bisnis dan Masyarakat	123
6.6	Etika pergaulan bisnis	125
6.7	Kepedulian Antara Pelaku Bisnis terhadap Etika	127
6.8	Tujuan Etika Bisnis	128
6.9	Prinsip Etika Bisnis	129
6.10	Perkembangan Dalam Etika Bisnis	130
6.11	Etika Bisnis bagi Akuntan	131
6.12	Contoh dan Analisis Kasus	136
BAB VII ETIKA DALAM AUDITING		141
7.1	Definisi Auditing	141
7.2	Etika Dalam Auditing	141
7.2.1	Kepercayaan Publik	141
7.2.2	Tanggung Jawab Auditor kepada Publik	142
7.2.3	Tanggung jawab	142
7.2.4	Independensi Auditor	142

7.3	Peraturan Pasar Modal dan Regulator Mengenai Independensi Akuntan Publik	144
7.4	Prinsip-Prinsip Kode Etika Perilaku Profesional	145
7.5	Hubungan Manajerial atau Karyawan-Jasa Akuntansi untuk Audit Klien	148
7.6	Sistem Pengendalian Mutu KAP	150
BAB VIII ETIKA PROFESI PERPAJAKAN		153
8.1	Tanggung Jawab Akuntan Pajak	153
8.2	Etika Akuntan Pajak	155
8.3	Kompleksitas Aturan Perpajakan Vs Tuntutan Klien	162
BAB IX ETIKA DALAM AKUNTANSI KEUANGAN DAN AKUNTANSI MANAJEMEN		167
9.1	Pengertian Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Manajemen	167
9.2	Etika Profesional Akuntan Manajemen	168
9.3	Kecurangan dalam Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Manajemen	172
9.4	Contoh dan Analisis Kasus	176
BAB X ETIKA DALAM KANTOR AKUNTAN PUBLIK		179
10.1	Etika Bisnis Akuntan Publik	179
10.2	Tanggung Jawab Sosial Kantor Akuntan Publik sebagai Entitas Bisnis	187
10.3	Krisis Dalam Profesi Akuntansi	188
10.4	Regulasi Dalam Rangka Penegakan Etika Kantor Akuntan Publik	189
10.5	<i>Peer Review</i>	191
10.6	Contoh Kasus	191
BAB XI ISU ETIKA SIGNIFIKAN DALAM DUNIA BISNIS DAN PROFESI		195
11.1	Isu Etika Kantor Akuntan Publik	195
11.2	Tanggung Jawab Sosial Bisnis	203

11.3 Manajemen Krisis	204
11.4 Aspek dalam Penyusunan Rencana Bisnis	205
11.5 Penanganan Krisis	205
11.6 Contoh Kasus dan Analisis	206
DAFTAR PUSTAKA	213
GLOSARIUM	217
PROFIL PENULIS	222

BAB I

KONSEPSI DASAR ETIKA

1.1 Pengertian Etika

Etika (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015) adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Etika adalah seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi (Maryani & Ludigdo, 2001). Etika berasal dari kata *ethos* sebuah kata dari Yunani, yang diartikan identik dengan moral atau moralitas. Kedua istilah ini dijadikan sebagai pedoman atau ukuran bagi tindakan manusia dengan penilaian baik atau buruk dan benar atau salah. Etika melibatkan analisis kritis mengenai tindakan manusia untuk menentukan suatu nilai benar dan salah dari segi kebenaran dan keadilan. Jadi ukuran yang dipergunakan adalah norma, agama, nilai positif dan universalitas. Oleh karena itu, istilah etika sering dikonotasikan dengan istilah-istilah: tata krama, sopan santun, pedoman moral, norma susila, dan lain-lain yang berpijak pada norma-norma tata hubungan antar unsur atau antar elemen di dalam masyarakat dan lingkungannya.

Perkembangan etika yaitu studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan, menurut ruang dan

waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya, maka:

1. Etika disebut juga filsafat moral adalah cabang filsafat yang berbicara tentang praktis (tindakan) manusia.
2. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak.

Tindakan manusia ini ditentukan oleh bermacam-macam norma. Norma dibagi lagi menjadi norma hukum, norma agama, norma moral dan norma sopan santun, dimana:

1. Norma hukum berasal dari hukum dan perundang-undangan,
2. Norma agama berasal dari agama,
3. Norma moral berasal dari suara batin, dan
4. Norma sopan santun berasal dari kehidupan sehari-hari sedangkan norma moral berasal dari etika.

1.1.1 Prinsip-Prinsip Etika

1. Tanggung jawab
Bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan dan terhadap hasilnya serta profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya.
2. Keadilan
Prinsip ini menuntut untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya.

3. Otonomi

Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya.

1.1.2 Fungsi Etika

1. Sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan pelbagai moralitas yang membingungkan.
2. Etika ingin menampilkan ketrampilan intelektual yaitu ketrampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis.
3. Orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil sikap yang wajar dalam suasana pluralisme.

1.1.3 Jenis-jenis Etika

1. Etika umum yang berisi prinsip serta moral dasar
2. Etika khusus atau etika terapan yang berlaku khusus. Etika khusus ini dibagi menjadi etika individual dan etika sosial. Etika sosial dibagi menjadi:
 - a) Sikap terhadap sesama;
 - b) Etika keluarga
 - c) Etika profesi misalnya etika untuk pustakawan, arsiparis, dokumentalis, pialang informasi
 - d) Etika politik
 - e) Etika lingkungan hidup, serta
 - f) Kritik ideologi Etika adalah filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang ajaran moral sedangkan moral adalah ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban.

Etika selalu dikaitkan dengan moral serta harus dipahami perbedaan antara etika dengan moralitas.

1.1.4 Etika dan Etiket

Etika berarti moral sedangkan etiket berarti sopan santun, juga dikenal sebagai *ethics* dan *etiquette*. Antara etika dengan etiket terdapat persamaan yaitu:

1. Etika dan etiket menyangkut perilaku manusia.
2. Kedua-duanya mengatur perilaku manusia secara normatif artinya memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Justru karena sifatnya normatif maka kedua istilah tersebut sering dicampur adukkan.

Perbedaan antara etika dengan etiket ialah:

1. Etiket menyangkut cara melakukan perbuatan manusia. Etiket menunjukkan cara yang tepat artinya cara yang diharapkan serta ditentukan dalam sebuah kalangan tertentu. Misalnya dalam makan, etiketnya ialah orang tua didahulukan mengambil nasi, kalau sudah selesai tidak boleh mencuci tangan terlebih dahulu. Di Indonesia menyerahkan sesuatu harus dengan tangan kanan. Bila dilanggar dianggap melanggar etiket. Etika tidak terbatas pada cara melakukan sebuah perbuatan, etika memberi norma tentang perbuatan itu sendiri. Etika menyangkut masalah apakah sebuah perbuatan boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan.
2. Etiket hanya berlaku untuk pergaulan. Bila tidak ada orang lain atau tidak ada saksi mata, maka

etiket tidak berlaku. Misalnya etiket tentang cara makan. Makan sambil menaruh kaki di atas meja dianggap melanggar etiket jika dilakukan bersama-sama orang lain. Bila dilakukan sendiri maka hal tersebut tidak melanggar etiket. Etika selalu berlaku walaupun tidak ada orang lain. Barang yang dipinjam harus dikembalikan walaupun pemiliknya sudah lupa.

3. Etiket bersifat relatif. Yang dianggap tidak sopan dalam sebuah kebudayaan, dapat saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Contohnya makan dengan tangan, bersenggak sesudah makan. Etika jauh lebih absolut. Perintah seperti, jangan berbohong jangan mencuri merupakan prinsip etika yang tidak dapat ditawar-tawar.
4. Etiket hanya memandang manusia dari segi lahirian saja, sedangkan etika memandang manusia dari segi dalam. Penipu misalnya tutur katanya lembut, memegang etiket namun menipu. Orang dapat memegang etiket namun munafik sebaliknya seseorang yang berpegang pada etika tidak mungkin munafik karena seandainya dia bersikap munafik maka dia tidak bersikap etis

1.2 Basis Teori Etika

1. Teori Teleologi

Teleologi berasal dari bahasa Yunani yaitu telos. Menurut teori ini kualitas etis suatu perbuatan atau tindakan diperoleh dengan dicapainya tujuan dari perbuatan itu sendiri. Ada dua macam aliran

dalam teori teleologi ini yaitu: utilitarisme dan egoisme.

a) Egoism

Menurut Rachels (2004: 146) artinya teori mengenai bagaimana kita seharusnya bertindak, tanpa memandang bagaimana kita biasanya bertindak. Menurut teori ini hanya ada satu prinsip perilaku yang utama, yakni prinsip kepentingan diri, dan prinsip ini merangkum semua tugas dan kewajiban alami seseorang. Egoisme psikologis: ditandai dengan ciri mengabaikan atau merugikan kepentingan orang lain. Egoisme Etis: mementingkan diri sendiri . Munculnya paham ekonomi kapitalis dalam ilmu ekonomi. Perbedaan *hedonisme* dengan *egoisme*:

- 1) *Egoisme* mementingkan diri sendiri ataupun kelompok meskipun orang atau kelompok lain dirugikan sedangkan *hedonisme* mementingkan diri sendiri demi kesenangan yang didapat secara individual.
- 2) *Hedonisme* mengandung sifat egoisme sedangkan egoisme belum tentu mengandung hedonisme. Hedonisme timbul dari kodrat manusia yang memang menginginkan suatu kesenangan sedangkan egoism timbul tidak hanya dari psikologis saja tapi bisa dari lingkungan sekitar.

b) *Utilitarisme*

Utilitarisme adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh David Hume. Dalam teori ini suatu perbuatan atau tindakan dapat dikatakan baik jika dapat menghasilkan manfaat. Akan tetapi bukan bermanfaat untuk pribadi seseorang saja, tapi untuk sekelompok orang atau sekelompok masyarakat.

2. Teori Hak

Teori Hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi, karena berkaitan dengan kewajiban. Hak dan kewajiban bagaikan dua sisi uang logam yang sama. Hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama. Karena itu hak sangat cocok dengan suasana pemikiran demokratis.

3. Teori *Deontologi*

Deontologi berasal dari bahasa Yunani *deon*, yang berarti kewajiban. Etika deontologi memberikan pedoman moral agar manusia melakukan apa yang menjadi kewajiban sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada. Suatu perilaku akan dinilai baik atau buruk berdasarkan kewajiban yang mengacu pada nilai-nilai atau norma-norma moral. Tindakan sedekah kepada orang miskin adalah tindakan yang baik karena perbuatan tersebut merupakan kewajiban manusia untuk melakukannya. Sebaliknya, tindakan mencuri, penggelapan dan korupsi adalah perbuatan buruk dan kewajiban manusia untuk menghindarinya. Etika deontologi tidak membahas apa akibat atau

konsekuensi dari suatu perilaku. Suatu perilaku dibenarkan bukan karena perilaku itu berakibat baik, tetapi perilaku itu memang baik dan perilaku itu didasarkan kewajiban yang memang harus dilaksanakan.

4. Teori Keutamaan (*Virtue*)

Virtue Etics dapat didefinisikan sebagai cara pikir seseorang yang memungkinkan dia untuk bertindak baik secara moral. Teori ini cenderung memandang sikap atau akhlak seseorang. Tidak ditanyakan apakah suatu perbuatan tertentu adil, atau jujur, atau murah hati dan sebagainya. Keutamaan bisa didefinisikan sebagai: disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Contoh keutamaan: *kebijaksanaan, keadilan, suka bekerja keras, dan hidup yang baik.*

Gambaran Manusia Seutuhnya

Manusia utuh = manusia berkarakter (keseimbangan)

No	Teori	Paradigma			
		Penalaran teori	Kriteria etis	Tujuan hidup	Hakikat manusia dan kecerdasan
1	Egoisme	Tujuan dari tindakan	Memenuhi kepentingan pribadi	Kenikmatan duniawi secara individu	Hakikat tidak utuh (PQ, IQ)
2	Utilitarianisme	Tujuan dari tindakan	Memberi manfaat/kegunaan	Kesejahteraan duniawi	Hakikat tidak utuh (PQ, IQ,

No	Teori	Paradigma			
		Penalaran teori	Kriteria etis	Tujuan hidup	Hakikat manusia dan kecerdasan
			bagi banyak orang	masyarakat	EQ)
3	Deontologi-Kant	Tindakan itu sendiri	Kewajiban mutlak setiap orang	Demi kewajiban itu sendiri	Hakikat tidak utuh (IQ, EQ)
4	Teori Hak	Tingkat kepatuhan terhadap HAM	Aturan tentang hak azazi manusia	Demi martabat kemanusiaan	Hakikat tidak utuh (IQ)
5	Teori Keutamaan	Disposisi karakter	Karakter positif-negatif individu	Kebahagiaan duniawi dan mental (psikologis)	Hakikat tidak utuh (IQ, EQ)
6	Teori Teonom	Disposisi karakter dan tingkat keimanan	Karakter mulia dan mematuhi kitab suci agama masing – masing individu dan masyarakat	Kebahagiaan rohani (surgawi, akhirat), mental dan duniawi	Hakikat utuh (PQ, IQ, EQ, SQ)

1.3 Etika dalam Perkembangan IPTEK

Timbulnya corak baru suasana etis di zaman sekarang tidak terlepas dari adanya perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi (Iptek). Kaitan antara etika dengan perkembangan Iptek, meliputi:

1. Ambivalensi kemajuan ilmiah, artinya di samping banyak berakibat positif terdapat juga akibat-akibat negatif.
2. Masalah bebas nilai. Pada saat-saat tertentu dalam perkembangan Iptek bertemu dengan moral. Ilmu tidak asing dengan nilai. Dengan kata lain ilmu tidak bebas nilai
3. Teknologi yang tidak terkendali. Banyak orang mendapat kesan bahwa proses perkembangan ilmu dan teknologi seolah-olah kebal terhadap tuntutan etis. Dengan memperhatikan segi-segi etis tidak menjadi tugas ilmu pengetahuan sendiri, melainkan tugas manusia di baik ilmu dan teknologi. Oleh karena itu kebijaksanaan dalam menjalankan kemampuan harus bertambah. Tidak semua yang bisa dilakukan dengan kemampuan ilmiah dan teknologis boleh dilakukan. Hal ini berarti manusia harus membatasi diri
4. Tanda-tanda yang Menimbulkan Harapan. Awalnya sangat sedikit perhatian untuk etika dalam masyarakat. Kalau ada masalah-masalah menyangkut moral manusia, perhatian terhubung etika baru tampak serius.

Pemikiran etis timbul menyusul perkembangan ilmiah dan teknologi. Contohnya, refleksi etis tentang persenjataan nuklir baru di mulai setelah bom atom pertama kali diledakkan. Dari contoh tersebut diketahui bahwa perkembangan teknologi selalu mendahului pemikiran etis. Pada hal sesungguhnya yang ideal adalah

pemikiran etis mendahului dan mengarahkan perkembangan ilmiah-teknologi.

1.4 Dilema Etika

Dilema etika merupakan situasi yang dihadapi oleh seseorang dimana ia harus membuat keputusan mengenai perilaku yang patut. Contoh sederhananya adalah jika seseorang menemukan cincin berlian, ia harus memutuskan untuk mencari pemilik cincin atau mengambil cincin tersebut. Para auditor, akuntan, dan pebisnis lainnya, menghadapi banyak dilema etika dalam karier bisnis mereka. Terlibat dengan klien yang mengancam akan mencari auditor baru jika tidak diberikan opini unqualified akan menimbulkan dilema etika jika opini unqualified tersebut ternyata tidak tepat untuk diberikan.

a. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelanggaran Etika

1. Kebutuhan Individu
2. Tidak Ada Pedoman
3. Perilaku dan Kebiasaan Individu Yang Terakumulasi dan Tak Dikoreksi
4. Lingkungan yang Tidak Etis
5. Perilaku dari Komunitas

b. Sanksi Pelanggaran Etika

1. Sanksi Sosial. Skala relatif kecil, dipahami sebagai kesalahan yang dapat dimaafkan.
2. Sanksi Hukum. Skala besar, merugikan hak pihak lain.

1.5 Pengertian Profesi

Profesi berasal dari bahasa latin "*Proffesio*" yang mempunyai dua pengertian yaitu janji/ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam pengertian yang lebih luas menjadi kegiatan "apa saja" dan "siapa saja" untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti sempit profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Poin-poin penting dalam pengertian profesi diantaranya:

1. Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan ketrampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia, di dalamnya pemakaian dengan cara yang benar akan ketrampilan dan keahlian tinggi, hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut.
2. Profesi merupakan bagian dari pekerjaan, namun tidak setiap pekerjaan adalah profesi. Seorang petugas staf administrasi bias berasal dari berbagai latar ilmu, namun tidak demikian halnya dengan Akuntan, Pengacara, Dokter yang membutuhkan pendidikan khusus.

3. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang mengandalkan keterampilan dan keahlian khusus yang tidak didapatkan pada pekerjaan-pekerjaan sebelumnya.
4. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pengemban profesi tersebut untuk terus memperbaharui keterampilannya sesuai perkembangan teknologi.

Etika profesi akuntansi adalah yaitu suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai Akuntan. Etika (Yunani Kuno: "*ethikos*", berarti "timbul dari kebiasaan") adalah sebuah sesuatu dimana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Secara metodologis, tidak setiap hal menilai perbuatan dapat dikatakan sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Karena itulah etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Akan tetapi berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga tingkah laku manusia, etika memiliki sudut pandang normatif. Maksudnya etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia.

1.6 Contoh dan Analisis Kasus

Kasus 1.

PRIVATISASI SARAT KOMERSIALISASI

Apapun modelnya privatisasi tidak akan pernah lepas dari komersialisasi. Jika sudah merambah pada dunia pendidikan, seperti tertuang pada RUU Badan hukum Pendidikan, dipastikan hanya kalangan masyarakat tertentu yang bisa berpartisipasi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencermati pola Badan Hukum Milik Negara (BHMN) di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) belakangan ini, ternyata kampus sudah mengarah pada praktik mencari penghasilan. Artinya, misi layanan publik sudah terabaikan, dimana hanya kalangan tertentu yang bisa mengenyam bangku kuliah (Miftah Thoha, Guru Besar Administrasi Publik UGM). Ketika negara ini hendak dirintis 65 tahun silam, para tokoh pendiri Republik ini sudah berkomitmen memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sektor pendidikan, merupakan jembatan strategis untuk mencapai cita-cita itu. Secara global, kata Miftah Thoha, pemikiran tersebut relevan dengan pengukuran indeks pembangunan manusia (Human Development Index - HDI). Anehnya di Negara ini - dengan alasan pasar bebas - makin tampak jelas upaya menjauh dari cita-cita itu. Privatisasi pada lembaga pendidikan dan rumah sakit adalah contoh konkret upaya komersialisasi sektor publik.

Salah tafsir otonomi

Miftah melihat fenomena itu sebagai apa yang diistilahkan kebablasan dalam menafsirkan otonomi. Khusus untuk sekolah dan kampus, otonomi tidaklah mesti lebih tajam pada manajemen kelembagaan ketimbang fungsi, visi dan misinya. Penegakan otonomi sekolah dan kampus hendaknya menekankan pada kemandirian akademik dan pelayanan kepada pemangku kepentingan tanpa terlalu banyak intervensi birokrasi. Bukan sebaliknya, dimana orang kampus lebih sibuk mengurus kelembagaan dan penghasilan ketimbang mengembangkan riset unggulan. Sementara itu, Masduki Baedlowi, dari komisi X DPR, melihat fenomena itu sebagai ketidakmampuan membawa diri dalam era pasar bebas. Kesepakatan WTO telah mengiring masyarakat untuk menganggap pendidikan sebagai industri jasa. Bukti konkretnya sudah tampak pada perguruan tinggi BHMN. Biaya kuliah menjadi mahal, dan ini secara ideologi bertentangan dengan pendidikan untuk semua. Untuk itu, komisi X DPR akan membentuk panitia untuk menghimpun masukan dan telaah kritis terhadap naskah RUU BHP.

Sumber: Kompas, 7 Oktober 2006

Pertanyaan:

1. Apakah anda setuju dengan pendapat Miftah Thoha bahwa perguruan tinggi dalam kerangka RUU BHP makin jauh dari cita-cita pendiri Republik ini? Jelaskan alasannya!

2. Apakah yang anda ketahui tentang pengertian “nilai”? Menurut anda nilai-nilai apa yang ingin dicapai dari proses pendidikan!
3. Apakah menurut anda sistem pengelolaan PT berdasarkan RUU BHP sejalan dengan pencapaian cita-cita pendidikan? (Hubungkan dengan teori-teori etika dan teori nilai yang anda ketahui)
4. Carilah referensi dari berbagai literatur tentang hakikat otonomi daerah! Bagaimana pendapat anda tentang penerapan otonomi daerah tersebut bila diimplementasikan pada pengelolaan PT?

Kasus 2.

SAHRUDIN, Asa Pasca Tambang Rakyat

Perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung kini lesu. Pemerintah belum juga menyiapkan secara matang sumber daya ekonomi pengganti pasca-penertiban tambang timah rakyat. Kondisi ini membuat masyarakat bingung mencari sumber penghasilan baru. Namun Sahrudin (38) punya solusi yang bukan sekedar wacana, tapi karya nyata. Sejak munculnya euphoria penambangan rakyat pada tahun 2002, Saharudin sudah merasa salah satu akibat yang dihasilkan dari penambangan timah secara tak terkendali ini adalah kerusakan alam. Penghasilan besar yang dicapai rakyat penambang secara instan tidak akan bertahan lama. Hasil dari penambangan itu memang sangat besar. Ibu-ibu yang melimbang timah bisa mendapatkan Rp 750.000 per hari. Akan tetapi apa yang akan diwariskan kepada anak cucu kelak? “Alam yang rusak dan tanah yang berlubang-lubang akibat galian tambang!” Lubang galian tambang itulah yang terpikir olehnya untuk dimanfaatkan. Di Desa Perlang, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, terdapat ratusan hektare lubang bekas galian tambang yang membentuk danau. Lubang galian ini hasil eksploitasi PT. Koba Tin, perusahaan timah Malaysia terbesar di Bangka Tengah, serta aktivitas tambang rakyat. “Waktu sekolah di Bandung, saya melihat banyak warga yang memanfaatkan kolam-kolam kecil untuk memelihara ikan. Kenapa danau-danau yang besar di desa ini tak dimanfaatkan?”. Saharudin membuat proposal kerjasama yang ditujukan kepada PT Koba Tin kolong timah di Kayu

Arang 3, Perlang seluas 3 ha untuk pembuatan keramba jaring apung guna memelihara ikan secara berkelompok. Tahun 2002, PT Koba Tin menyetujui pembuatan dua set keramba jaring apung sebanyak 12 petak, berikut bantuan 290 ekor induk ikan nila. Tiga petak keramba diantaranya dibuat oleh Kelompok Tani Mutiara yang dipimpin oleh Sahrudin. Banyak warga Perlang mencibir usaha ini. Mereka menganggap budi daya ikan air tawar Sahrudin sia-sia karena keuntungannya tidak besar. Dengan tekun ia terus mengembangkan usahanya hingga mampu menghasilkan ribuan bibit ikan. Dari hasil penjualan bibit ikan itu seluruh utang Kelompok Tani Mutiara kepada PT Koba Tin bisa dilunasi. Sifat keramba yang mudah rusak membuat Sahrudin membuat kolam baru berupa bak dengan tetap menggunakan aliran air kolong sebagai sumbernya. Bekerjasama dengan PT Koba Tin dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Kelompok Tani Mutiara membuat 32 kolam. Jenis ikan yang dibudidayakan juga makin bervariasi. Setiap kolam menghasilkan sekitar 200 kg ikan sekali panen.

Ujian tiba

Daya juang Sahrudin diuji saat ratusan tambang timah apung beroperasi di bagian hulu kolong. Seluruh ikan yang dipelihara mati karena air yang masuk ke kolam tercemar solar dan lumpur. Para anggota Kelompok Tani Mutiara putus asa karena ratusan penambang itu sulit dikendalikan. Ratusan penambang baru ditertibkan polisi setelah mereka melaporkan situasinya kepada Kementerian Lingkungan Hidup.

Dibutuhkan waktu setahun untuk mengembalikan kualitas air yang tercemar. Pemberdayaan masyarakat desa terus dilakukan oleh Sahrudin. Ia merintis pembentukan Kelompok Tani Bina Bersama yang dipersiapkan untuk mengelola peternakan sapi. Ia juga mengundang akademisi dari Universitas Bangka Belitung untuk memberikan wawasan agrobisnis. Awalnya Sahrudin ragu karena peternakan sapi merupakan budaya baru bagi masyarakat asli Bangka. Dalam sejarah, pekerjaan utama masyarakat Bangka Belitung adalah petani lada dan penambang timah. Berkat dukungan Dinas Peternakan dan Kehutanan Babel yang memberikan pelatihan, Sahrudin dan 20 anggota kelompoknya mencoba beternak sapi. Lahan seluas 3 ha ditanami rumput gajah sebagai pasokan pakan. Pemerintah pusat memberikan bantuan bergulir sebanyak 42 ekor sapi induk. Dengan perawatan telaten kini jumlahnya menjadi 63 ekor. Pada tahun kedua, sapi sudah dapat digulirkan kepada anggota-anggota baru. Sahrudin juga bekerja sebagai guru sekaligus sebagai wakil kepala SMK Idrus Sariah Koba, mengurus sapi sepulang mengajar. Pada hari Sabtu dan Minggu, ia kuliah untuk meraih gelar sarjana pada Universitas Bangka Belitung. Limbah dari peternakan ini juga dikelola. Bersama Institut Pertanian Bogor, Sahrudin membuat digester biogas yang memanfaatkan kotoran sapi sebagai sumber listrik dan bahan bakar memasak. Limbah padat dan cair hasil fermentasi kotoran sapi diolah menjadi pupuk organik yang bernilai ekonomis. Berkat keberhasilannya merintis pertanian terpadu itu, warga sekitar tertarik untuk mengikuti jejak Sahrudin. Saat ini usaha pertanian

terpadu ini seringkali dijadikan pola agrobisnis dari berbagai daerah. “Memberi contoh adalah cara terbaik untuk menggerakkan masyarakat”.

Sumber: Kompas, 3 April 2007

Pertanyaan:

1. Bagaimana anda menilai pribadi Sahrudin dilihat dari hakikat manusia utuh?
2. Bagaimana anda menjelaskan tindakan Sahrudin berdasarkan teori-teori etika yang telah anda pelajari?
3. Bagaimana anda menjelaskan tindakan PT Koba Tin dan dinas-dinas terkait Provinsi Babel dalam kaitannya dengan usaha kelompok Sahrudin di atas?

BAB II

ETHICAL GOVERNANCE

2.1 Konsepsi Ethical Governance

Governance systems adalah sistem yang dirancang untuk memastikan efektifitas dan efisiensi implementasi ethical governance. *Ethical Governance* (etika pemerintahan) adalah ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Dalam *Ethical Governance* (etika pemerintahan) terdapat juga masalah kesusilaan dan kesopanan ini dalam aparat, aparatur, struktur dan lembaganya. Kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari suara hati manusia. Suara hati manusia menentukan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk, tergantung pada kepribadian atau jati diri masing-masing. Manusia berbuat baik atau berbuat buruk karena bisikan suara hatinya (*consience of man*). Ethical governance and governance system adalah konsep serta sistem pengelolaan organisasi yang berbasis etika.

Konsepsi etika, sebenarnya sudah lama diterima sebagai suatu sistem nilai yang tumbuh dan berkembang pada peradaban manusia, sehingga dengan demikian-pada dasarnya etika berkenaan dengan serangkaian upaya yang menjadikan moralitas- sebagai landasan bertindak dalam tatanan kehidupan yang kolektip. Nilai-nilai etika yang hidup dan berlaku dalam suatu masyarakat, bukanlah sekedar menjadi keyakinan pribadi- bagi para anggotanya, akan tetapi juga menjadi seperangkat norma yang terlembagakan. Dengan kata